



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI PERSEPSI KORUPSI

PADA

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB II METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	5
2.5. Teknik Analisis Data.....	5
2.6. Tahapan Pelaksanaan	6
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil Responden	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli ...	22
BAB IV PENUTUP	22
Kesimpulan	24
Rekomendasi.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6.7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.6. Ruang Lingkup Survey Indeks Persepsi Korupsi	7
Tabel 2.6.1. Nilai Persepsi.....	8
Tabel 3.1.1. Tingkat Pendidikan	9
Tabel 3.1.2. Jenis Pekerjaan Responden	10
Tabel 3.1.3. Usia Responden	11
Tabel 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan	11
Tabel 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan	13
Tabel 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh.....	14
Tabel 3.2.4. Indikator Transparansi Biaya	15
Tabel 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan.....	16
Tabel 3.2.6. Indikator Hadiah.....	17
Tabel 3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran.....	18
Tabel 3.2.8. Indikator Pencaloan	19
Tabel 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang.....	20
Tabel 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia	21
Tabel 3.3. Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada PN. Gunungsitoli	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan Pelaksana dilaksanakan sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- b) Penyiapan bahan kuesioner, bagian dari kuesioner/pengantar dan kelengkapan peralatan, penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data, jumlah responden dan lokasi dan waktu pengumpulan data.
- c) Penyusunan Jadwal, penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a) Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan didalam kuesioner.
- b) Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- c) Pengujian kualitas dan validitas data.
- d) Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Metode dilakukan secara periodik semester dalam interval waktu per 6 (enam) bulan (dua kali setahun).

BAB II

METODELOGI

2.1. Metodologi Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskripsi kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu lima hari atau data minimal 50 (lima puluh) responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan. Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Hakim Pengawas Bidang Hukum). Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggungjawab terhadap hasil perhitungan survey IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk scoring /angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan disetiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

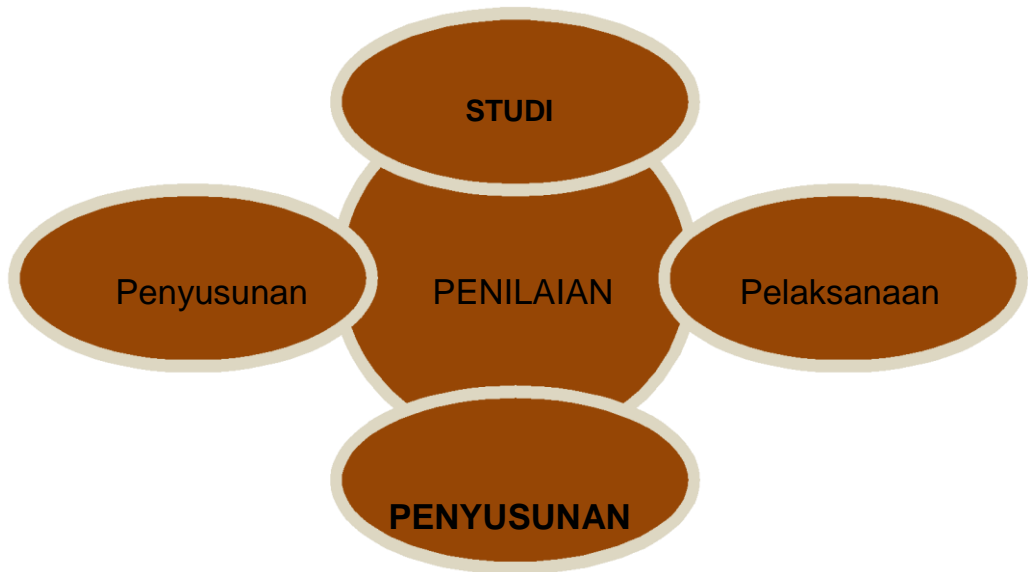
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara

1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **Bersih Dari Korupsi**.

2.6. Tahap Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 2.6. Model Alur Penyusunan Survey IPK Menuju Zona Integritas



Tabel 2.6. Ruang Lingkup Survey Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruanglingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 2.6.1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih Dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari Korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

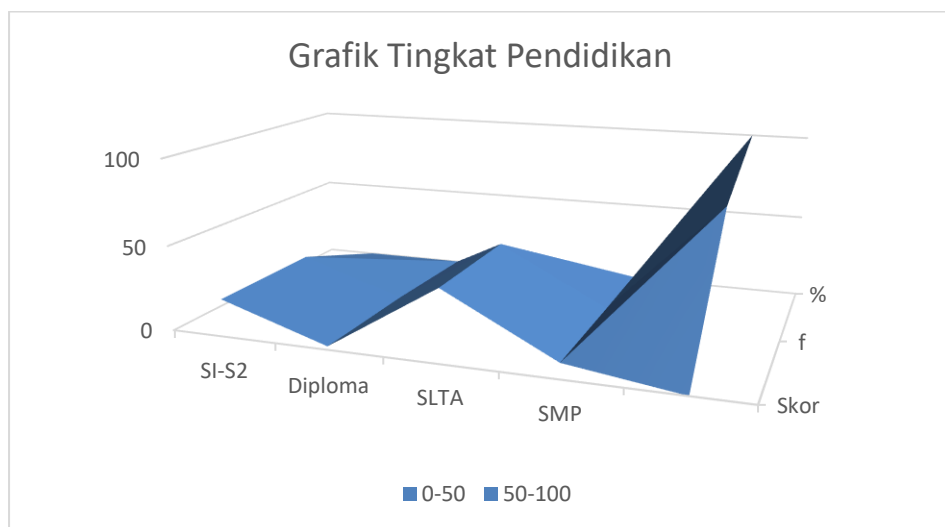
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli mayoritas memiliki pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Tabel 3.1.1. Tingkat Pendidikan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	SI-S2	22	22	29,33
2.	Diploma	2	2	2,66
3.	SLTA	42	42	56,00
4.	SMP	9	9	12,00
Jumlah			75	100.00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



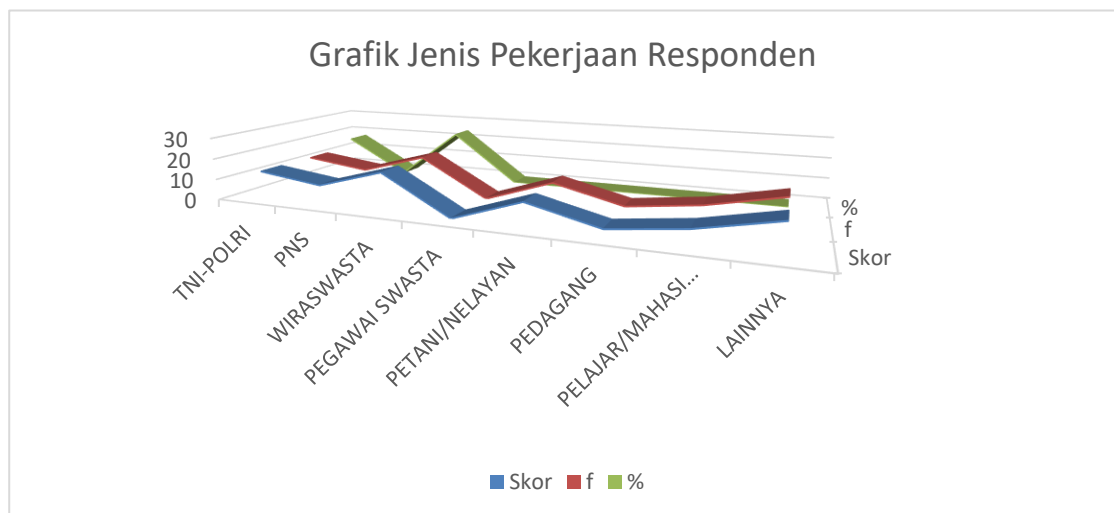
3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebagian besar responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, petani, dan lainnya seperti advokat.

Tabel 3.1.2. Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	TNI-POLRI	13	13	17,33
2.	PNS	9	9	12,00
3.	WIRASWASTA	18	18	24,00
4.	PEGAWAI SWASTA	0	0	00,0
5.	PETANI/NELAYAN	11	11	14,66
6.	PEDAGANG	3	3	4,00
7.	PELAJAR/MAHASISWA	7	7	9,33
8.	LAINNYA	14	14	18,66
	JUMLAH	75	75	100,00

Berdasarkan table tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



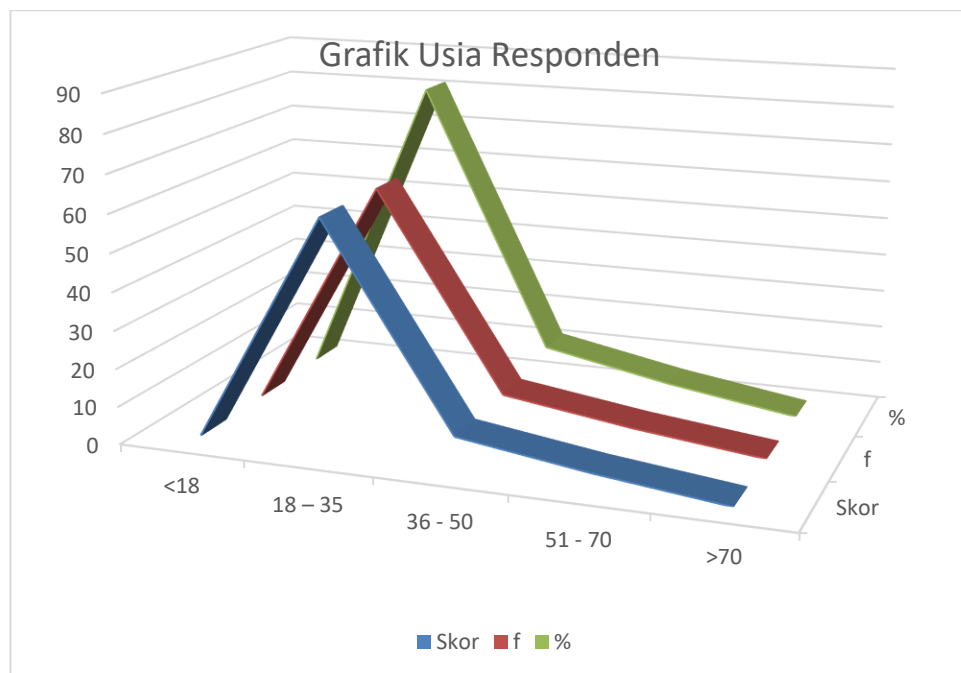
3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada pada kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 35 tahun. Bagi kelompok usia 36-50 tahun jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia kurang dari 18 tahun.

Tabel 3.1.3. Usia Responden

No.	Usia	Skor	Freku	
			f	%
1.	<18	1	1	1.33
2.	18 – 35	61	61	81.33
3.	36 - 50	9	9	12.00
4.	51 - 70	4	4	5.33
5.	>70	0	0	0

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

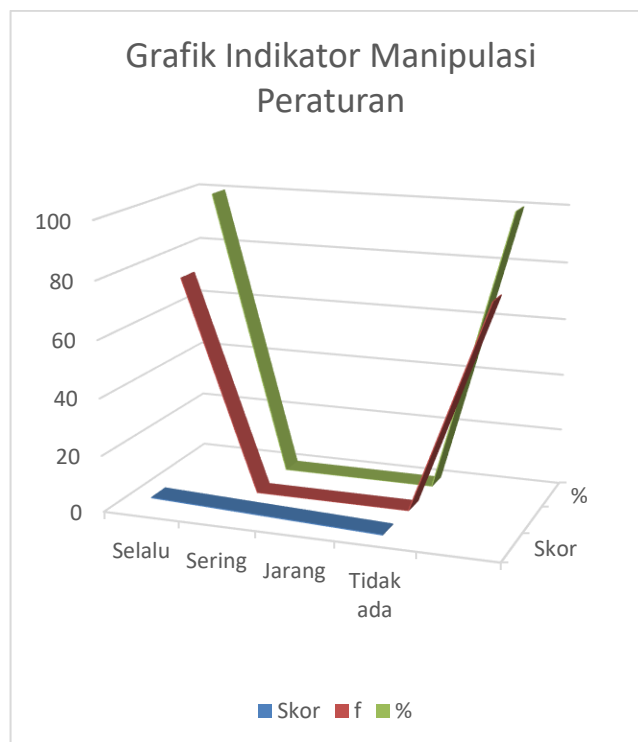
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli bersih dari Korupsi.

Tabel 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	75	100
2.	Sering	3	0	0
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak ada	1	0	0
			75	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



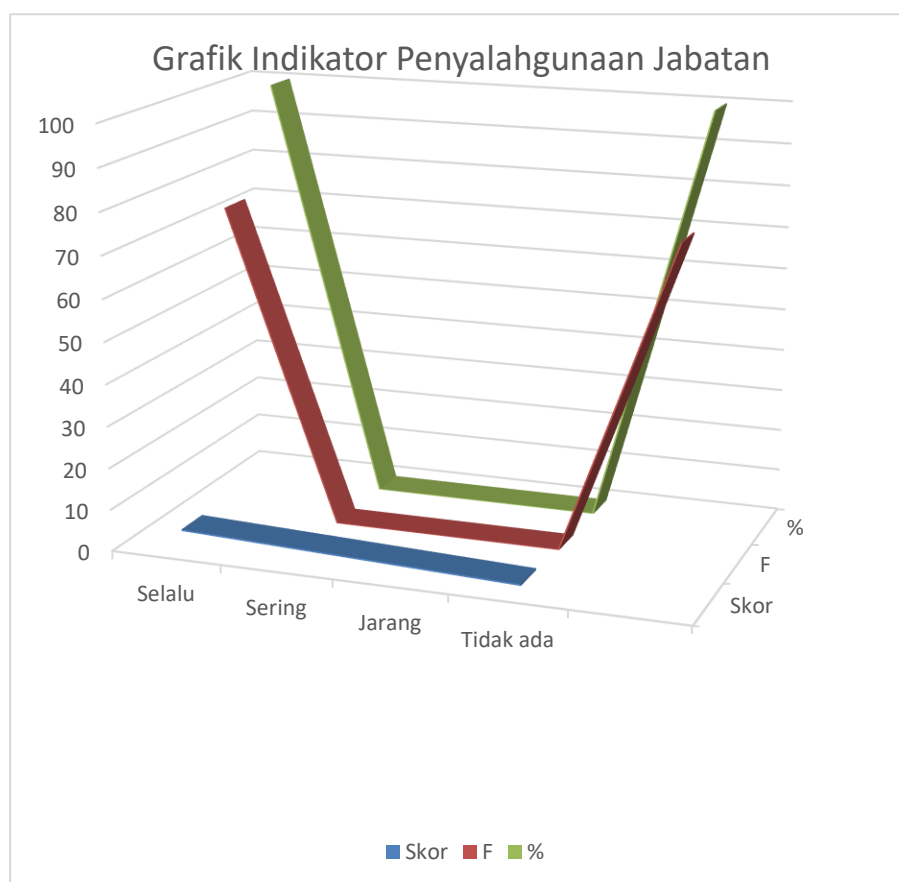
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil index 4. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli bersih dari Korupsi.

Tabel 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	4	75	100
2.	Sering	3	0	0
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak ada	1	0	0
			75	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



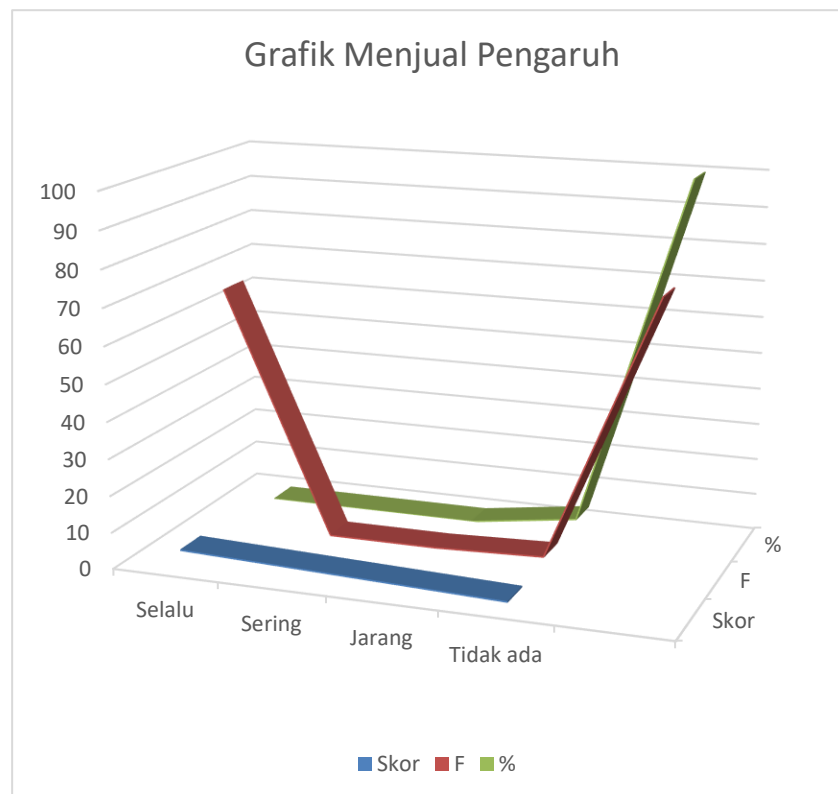
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil index 3.8. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli bersih dari Korupsi.

Tabel 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	4	68	90,67
2.	Sering	3	2	2,67
3.	Jarang	2	2	2,67
4.	Tidak ada	1	3	4
			75	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



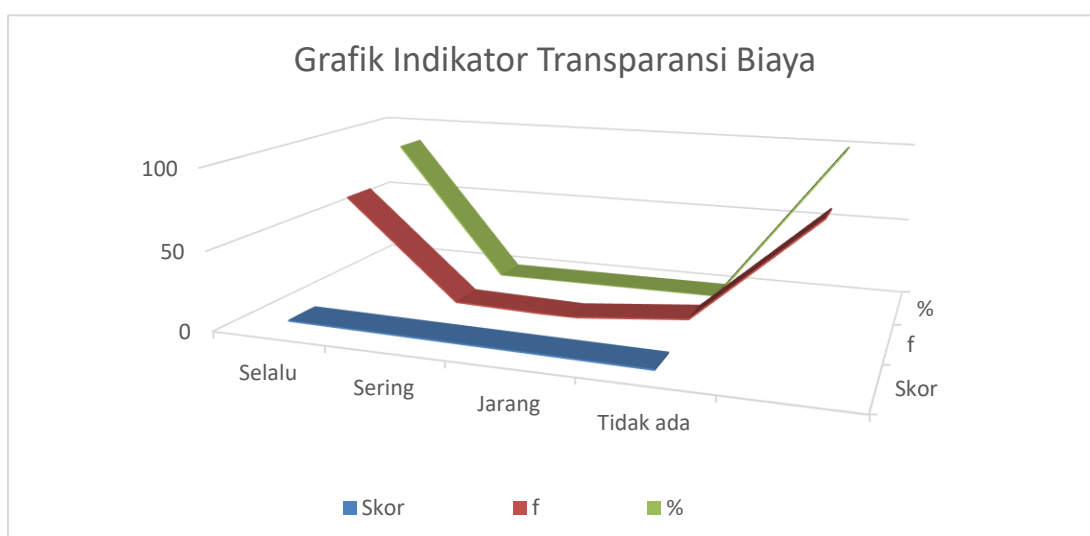
3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indicator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil index 3.69. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli bersih dari korupsi.

Tabel 3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	4	66	88
2.	Sering	3	2	2,67
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak ada	1	7	9,33
			75	100

Berdasarkan table tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



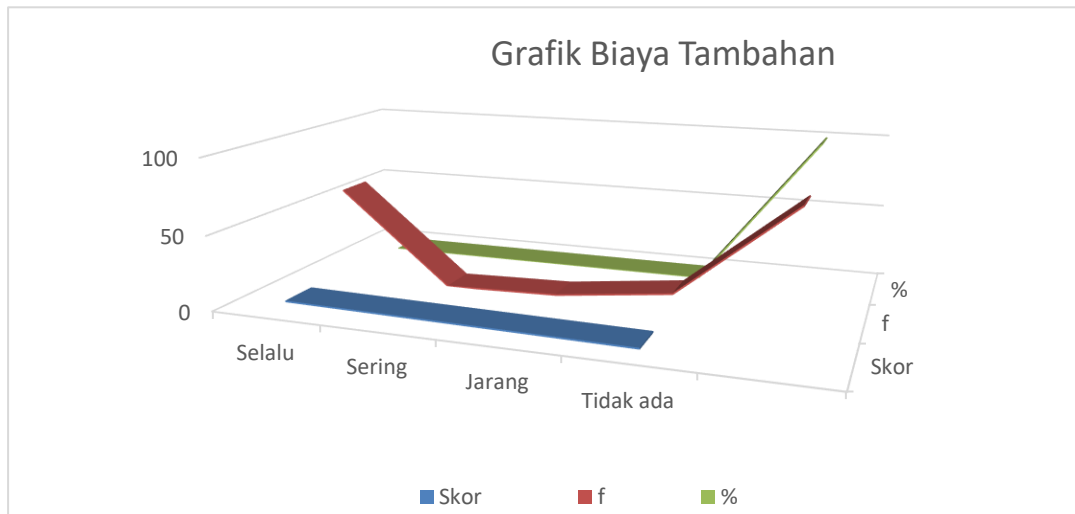
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.50. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli bersih dari Korupsi.

Tabel 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Freku	
			F	%
1.	Selalu	4	62	82,67
2.	Sering	3	0	0
3.	Jarang	2	2	2,67
4.	Tidak ada	1	11	14,67
			75	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

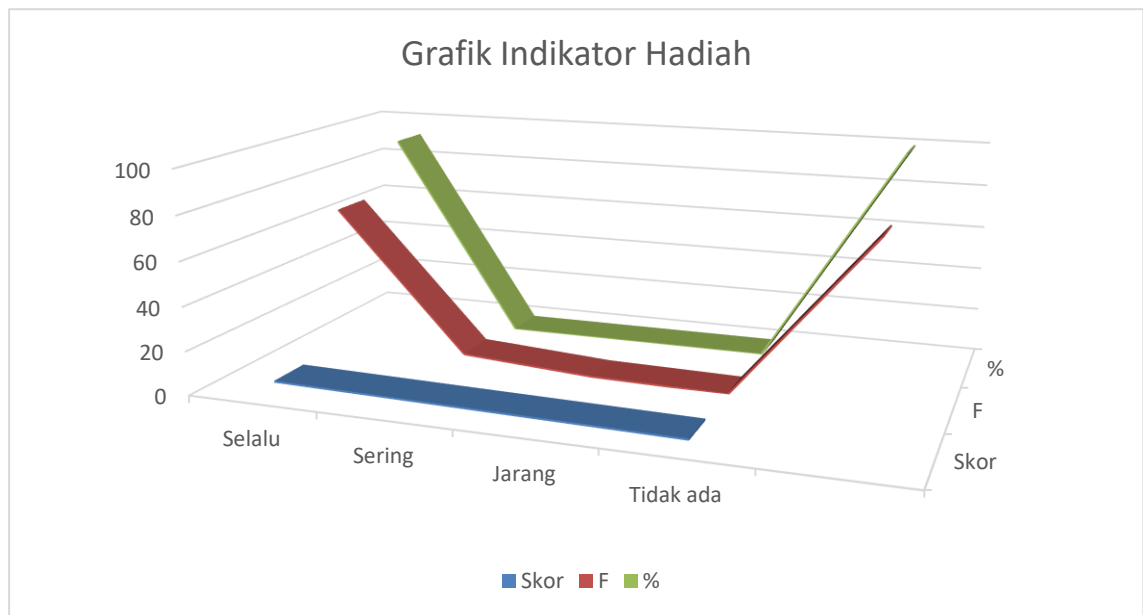


3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3.90. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli bersih dari korupsi.

Tabel 3.2.6. Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Freku	
			F	%
1.	Selalu	4	69	92
2.	Sering	3	5	6,67
3.	Jarang	2	1	1,33
4.	Tidak ada	1	0	0
			75	100



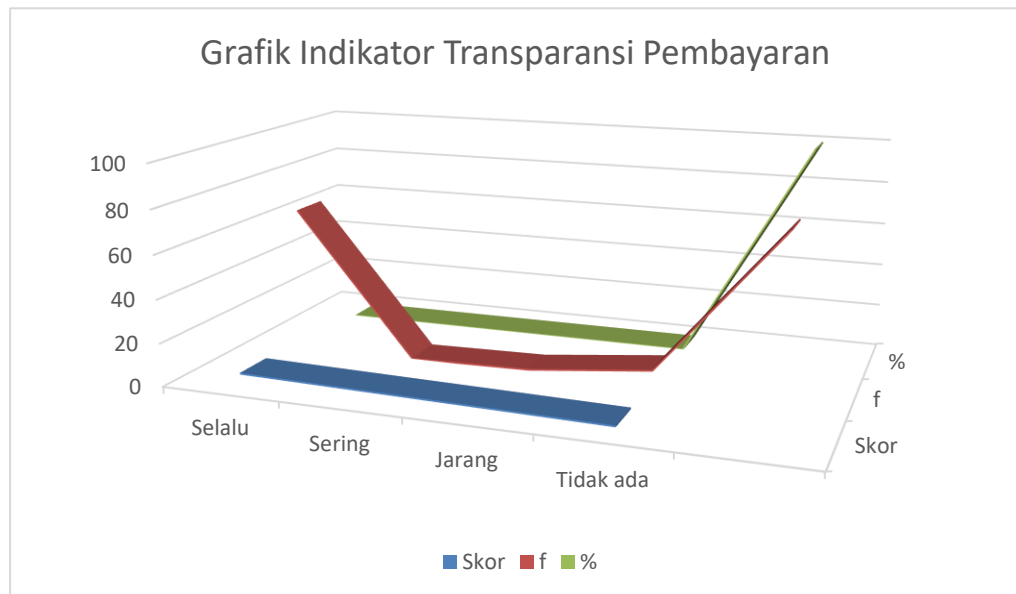
3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 3.69. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli bersih dari korupsi.

Tabel 3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	4	67	89,33
2.	Sering	3	0	0
3.	Jarang	2	1	1,33
4.	Tidak ada	1	7	9,33
			75	100

Berdasarkan table tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

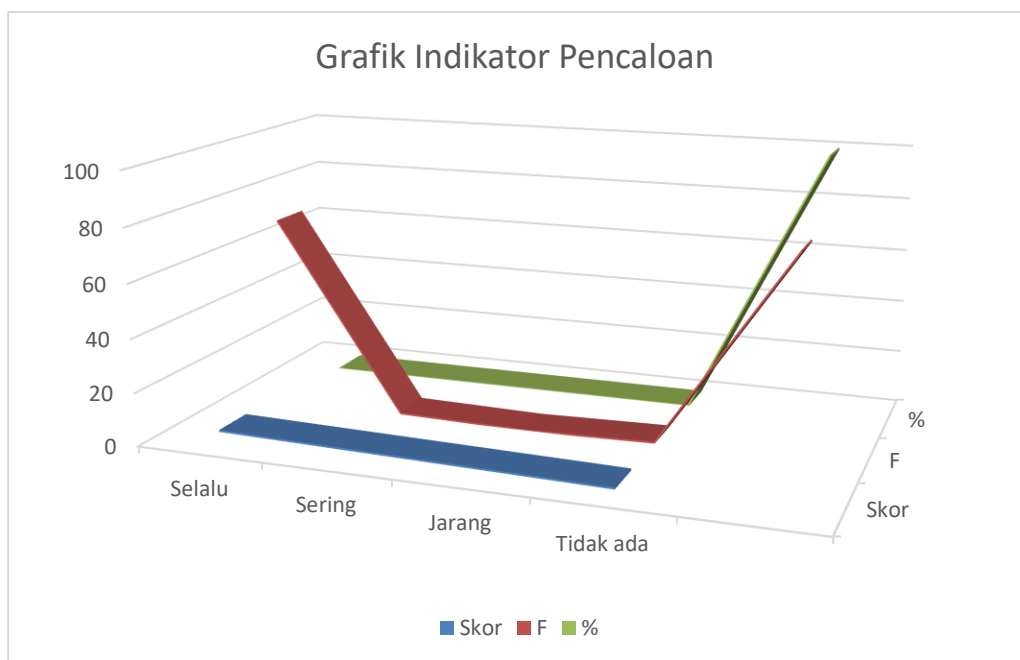


3.2.8. Indikator Pencaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indicator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3.89. Indeks dapatdiartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitolibersih dari Korupsi.

Tabel 3.2.8. Indikator Pencaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	4	72	97,33
2.	Sering	3	1	1,33
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak ada	1	1	1,33
			75	100



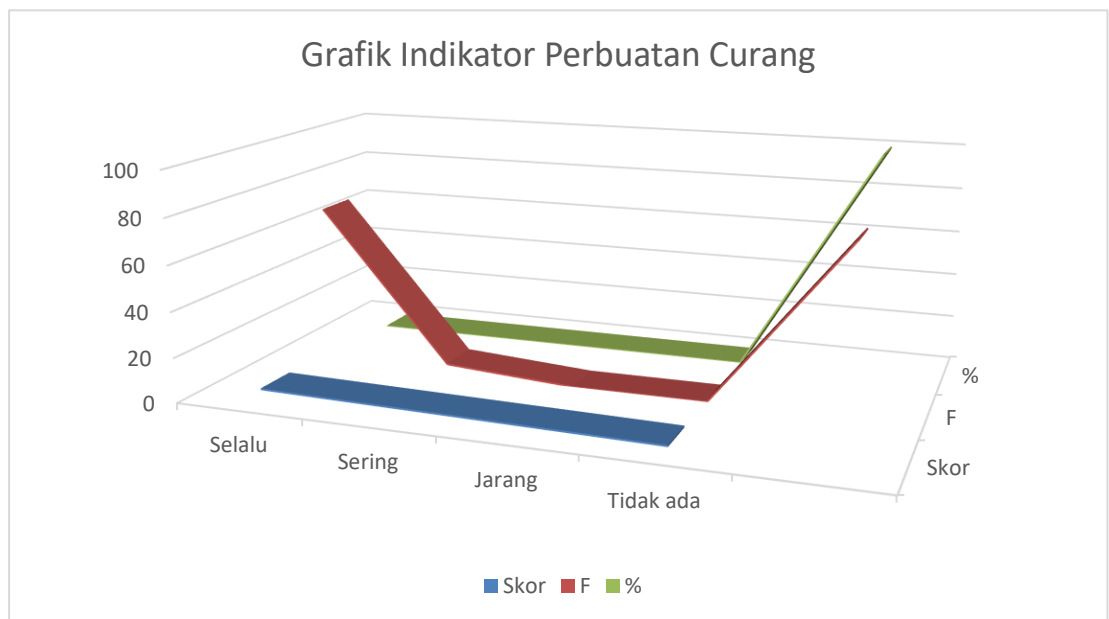
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3.94. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli bersih dari Korupsi.

Tabel 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	4	71	94,67
2.	Sering	3	4	5,33
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak ada	1	0	0
			75	100

Berdasarkan table tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



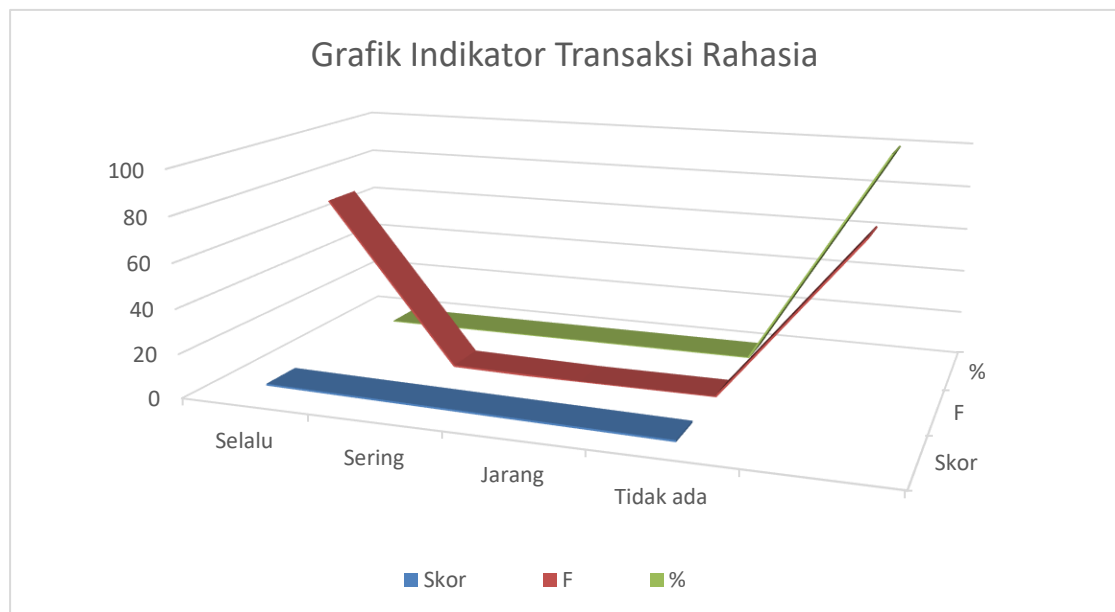
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3.98. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli bersih dari Korupsi.

Tabel 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	4	74	98,67
2.	Sering	3	1	1,33
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak ada	1	0	0
			75	100

Berdasarkan table tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Dari indeks 10 indikator tersebut diatas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Sebesar **93.30**. Indeks **93.30** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor Indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI..**

Tabel 3.3. Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL (IPK)	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survey yang dilakukan ini juga mejaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang sudah memadai dan terarah untuk dipertahankan.
2. Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan bekerja berdasarkan aturan;
3. Transparansi Biaya sebaiknya lebih dipublikasi;
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dipertahankan agar tidak ada hubungan langsung antara Pegawai dan Pencari Keadilan
5. Memperbaharui daftar panjar biaya perkara sesuai dengan kondisi saat ini;

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,84 atau masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan/ Prosedur, mendapat Indeks 4.00
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.8
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.69
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.50
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.90
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3.69
8. Indikator Pencaloan, mendapat indeks 3.89
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.94
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3.98

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tahun 2019 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki Indeks diatas 3.89 atau masuk pada persepsi **Bersih Dari Korupsi**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator "**Biaya Tambahan**" memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya;